

KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Amanda Aprilia
NPP. 31.0270

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: amandaaprilia212@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Backgorund (GAP): Floods are the most frequent disaster in Bengkulu City. This flood event can disrupt the course of activities, government activities, the economy, mobility and all aspects of people's lives will be hampered if a flood disaster occurs. BPBD is a regional government organization that plays a role as a Leading Sector in the task of organizing disaster management affairs together with other organizations. **Objective:** This research aims to analyze work coordination between BPBD and related agencies and institutions in managing flood disasters in Bengkulu City **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, the data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions **Results/Findings:** The results of this research show that the Bengkulu City BPBD has coordinated quite well as a coordinator in implementing disaster management as evidenced by the indicators of unity of action, communication, division of work, which have been implemented well. The inhibiting factors found were the lack of human resources who have skills in flood disaster management, facilities and infrastructure that are still classified as inadequate, and community participation which is still classified as lacking to help officers carry out disaster management. Efforts made include improving the quality of human resources by providing special education and training about disasters, improving facilities and infrastructure and proposing the need for facilities and infrastructure, as well as conducting outreach to increase community participation in flood disaster management. **Conclusion:** The coordination of the Bengkulu City Regional Disaster Management Agency in managing the flood disaster in the city of Bengkulu can be realized if the coordination carried out by the BPBD and related agencies runs optimally so as to provide optimal results.

Keywords : Coordination, BPBD, Flood disaster, Bengkulu City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi Kota Bengkulu. Peristiwa Banjir ini dapat mengganggu jalannya

aktivitas, kegiatan pemerintahan, perekonomian, Mobilitas dan segala aspek kehidupan masyarakat akan terhambat apabila bencana Banjir sedang Terjadi. BPBD merupakan organisasi pemerintahan daerah yang berperan sebagai Leading Sector dalam tugas penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana bersama dengan organisasi lainnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi kerja antara BPBD dan dinas dan Lembaga terkait dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Bengkulu telah melakukan koordinasi dengan cukup baik sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan indikator kesatuan Tindakan, komunikasi, pembagian kerja, yang sudah terlaksana dengan baik. Adapun Faktor penghambat yang ditemukan ialah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill dalam penanggulangan bencana banjir, sarana dan prasarana yang masih tergolong belum memadai, serta partisipasi masyarakat yang tergolong masih kurang untuk membantu petugas melakukan penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus tentang bencana, memperbaiki sarana dan prasarana serta mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana, serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. **Kesimpulan:** koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kota Bengkulu dapat terwujud apabila koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dan instansi terkait berjalan secara maksimal sehingga memberikan hasil yang optimal.

Kata Kunci : Koordinasi, BPBD, Bencana banjir, Kota Bengkulu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terletak di mana empat lempeng samudera dan benua bertemu. Lempeng-lempeng ini adalah Asia, Australia, India, dan Pasifik. Karena lokasinya, Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan perubahan iklim. Hal ini ditunjukkan dengan sifat abadi dari isu-isu Indonesia, seperti banjir musim hujan dan kekeringan musim kemarau.

Kota Bengkulu yang merupakan kota kecil yang berlokasi didataran rendah. Memiliki wilayah pesisir yaitu wilayah Pantai Panjang yang merupakan Pantai Terpanjang di Indonesia. Hal ini membuat kota Bengkulu berpotensi terjadi beragam jenis bencana banjir setiap tahunnya, dan dipicu dengan kebiasaan hidup masyarakat Frekuensi bencana banjir di kota Bengkulu sempat mengalami penurunan di tahun 2024 namun meningkat drastis ditahun 2022. hal ini disebabkan oleh Beberapa Faktor lain seperti curah hujan yang tinggi dan begitu banyak orang telah memilih untuk tinggal di dataran rendah yang berdekatan dengan sepanjang jalur sungai, serta proses pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang kurang optimal.

Permasalahan yang ada di Kota Bengkulu mengenai penanggulangan

banjir sangatlah memerlukan perhatian dari Pemerintah baik dari sarana dan prasarana, pencegahan yang efektif serta koordinasi yang belum sepenuhnya mengikat setiap sektor untuk berfokus dalam pengerjaan di permasalahan yang sama dengan saling bersinergi dalam penanganan pada bidang masing-masing. Peningkatan penyelenggaraan akan penanggulangan bencana banjir yang di sertai pembagian tugas dan penyelarasan tujuan dalam koordinasi akan menyederhanakan kerja setiap elemen yang terlibat.

Dalam Bertindak cepat menanggapi perubahan keadaan, diperlukan Langkah pelaksanaan kegiatan yang harus dimulai dengan perencanaan strategis dan kerjasama koordinasi yang efektif. Ketika krisis melanda, sangat penting bagi semua pihak terkait untuk berkoordinasi, termasuk rumah sakit, media (Kominfo, BPBD, PMI), dan pemerintah (PMI), memiliki akses ke informasi yang tepat waktu dan akurat.

Berangkat dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana koordinasi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD dikota bengkulu serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan hambatan hingga bisa dievaluasi terutama dari segi proses pencegahan dan penanggulangan dimasa yang akan datang untuk manajemen bencana yang efektif untuk menghadapi resiko bencana banjir dikota Bengkulu . Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul **“Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan**

1.2 Kesenjangan Masalah

Kota Bengkulu yang merupakan kota kecil yang berlokasi didataran rendah. Memiliki wilayah pesisir yaitu wilayah Pantai Panjang yang merupakan Pantai Terpanjang di Indonesia. Hal ini membuat kota Bengkulu berpotensi terjadi beragam jenis bencana banjir setiap tahunnya, dan dipicu dengan kebiasaan hidup masyarakat sekitar yang kurang menjaga lingkungan.

Tabel 1. 1
Kejadian Bencana Banjir Tahun 2020-2022 Dikota Bengkulu

No	Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Banjir	Kecamatan	Kelurahan	Rumah terendam
1	2	3	4	5	6
1	2020	24 Kejadian	6 Kecamatan	18 Kelurahan	385 rumah
2	2024	20 Kejadian	5 Kecamatan	14 Kelurahan	1.648 rumah
3	2022	29 Kejadian	6 Kecamatan	20 Kelurahan	1.724 rumah

Sumber : BPBD Kota Bengkulu 2020-2022

Pada table 1.1 dapat dilihat bahwa Frekuensi bencana banjir dikota Bengkulu sempat mengalami penurunan di tahun 2024 namun meningkat drastis ditahun 2022. hal ini disebabkan oleh Beberapa Faktor lain seperti curah hujan yang tinggi dan begitu banyak orang telah memilih untuk tinggal di dataran rendah yang berdekatan dengan sepanjang jalur sungai, serta proses

pengecahan dan penanggulangan bencana banjir yang kurang optimal. Banjir di kota Bengkulu memiliki banyak dampak kerugian bagi masyarakat, baik secara langsung dan tidak langsung. Dampak kerugian langsung yang di alami masyarakat ialah terputusnya akses jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerugian harta benda karena terendam banjir ataupun hanyut dan terhentinya kegiatan sehari-hari masyarakat. Dampak kerugian tidak langsung yang di alami masyarakat adalah memunculkan penyakit endemik di wilayah banjir.

1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa peneltiin terdahulu yang membahas tentang koordinasi dalam penanggulangan bencana maupun konteks koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir. Pertama, Endah Mustika Ramdani (2015) KOORDINASI OLEH BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan posisi koordinator belum optimal. Saat ini, paradigma manajemen bencana masih belum dipahami dengan baik. Lembaga-lembaga terkait koordinasi belum menyesuaikan diri dengan peran baru BPBD sebagai koordinator, tetapi lebih fokus pada kebijakan dan regulasi internal masing-masing. Terjadi duplikasi upaya yang menunjukkan bahwa spesialisasi pekerjaan belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan dalam bidang kebencanaan, seiring dengan peningkatan pengetahuan, pertumbuhan, dan sosialisasi di bidang tersebut. Kedua, Edho Yayang Pratama (2022) KOORDINASI BPBD DAN DINAS PUPR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU dengan hasil temuan Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara BPBD dan Dinas PUPR masih belum optimal dalam mengatasi bencana banjir di Kota Bengkulu. Beberapa faktor yang memengaruhi kerjasama antara kedua instansi tersebut termasuk kurangnya komunikasi yang efektif dan pemahaman yang kurang tentang peran masing-masing instansi. Untuk meningkatkan kerjasama antara BPBD dan Dinas PUPR dalam mengatasi bencana banjir di Kota Bengkulu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi antara keduanya, pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing instansi, serta perencanaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kerjasama antara BPBD dan Dinas PUPR dalam penanganan bencana banjir di Kota Bengkulu. Ketiga, Kansrida Br Tarigan (2015) KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KARO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG BPBD Kabupaten Karo belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa BPBD Kabupaten Karo masih relatif baru terbentuk, dengan jumlah pegawai dan fasilitas kantor yang belum memadai. Selain itu, hubungan antara BPBD Kabupaten Karo dan dinas-dinas lainnya juga belum mencapai tingkat harmoni yang diinginkan, karena masih terdapat ego sektoral di antara instansi-instansi tersebut dalam konteks penanggulangan bencana Keempat, Cindy Monica (2023) KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN

PASCABENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN dengan hasil analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi BPBD dengan Dinas PU dalam pelaksanaan pasca bencana banjir di Kota Medan belum maksimal menurut konteks kesatuan tindakan yang belum optimal, komunikasi, pembagian kerja yang mana ini kapasitas SDM juga mempengaruhi kinerja dari kedua instansi tersebut, yang mana jumlah SDM dan juga kemampuan dari segi pengalaman masih belum optimal serta disiplin yang masih kurang dalam mensegerakan pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan. Kelima Vira Amalia Bakti, Fadlurrahman (2020) KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA DI KABUPATEN PURWOREJO Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo pada kondisi pra, saat, dan pascabencana sudah cukup baik untuk menanggulangi bencana, yang terlihat melalui mekanisme dasar koordinasi (vertikal dan horizontal). Namun koordinasi masih mengalami hambatan, misalnya: adanya organisasi masyarakat dan pihak swasta yang tidak melakukan koordinasi dengan BPBD saat terjadi bencana. Faktor-faktor pendorong keberhasilan koordinasi di antaranya: adanya forum pertemuan (fisik dan nonfisik), transparansi dalam penciptaan keputusan, evaluasi secara bersama para pihak, dan dukungan desentralisasi penanganan bencana di setiap instansi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing pihak. Keenam Sitompul, Munawir Pamaun (2021) KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN hasil penelitian, dapat diketahui bahwa koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan secara garis besar dinilai dari kesembilan variabel telah dipenuhi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan meskipun tidak cukup sempurna. Karena masih ada kekurangan pada tujuan mitigasi kultur, komunikasi kepada masyarakat, lingkungan sosial serta pengurangan resiko banjir. Meskipun demikian BPBD Kota Medan tetap berupaya semaksimal mungkin bersama stakeholders lain agar dapat mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Ketujuh Septi Dwi Wulandari (2022) KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN Hasil penelitian bahwa kesatuan tindakan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola masalah sampah di jaringan drainase dan sungai. Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian tugas menunjukkan bahwa kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap pekerjaannya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan perawatan rutin jaringan drainase. Pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana perbedaan tersebut berada di lokasi penelitian yang mana penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kota Bengkulu provinsi Bengkulu. Selain itu fokus penelitian penulis membahas tentang

penanggulangan bencana banjir dikota Bengkulu yang menjadia bencana yang paling sering terjadi dikota Bengkulu. Fokus penelitian ini membahas tentang koordinasi BPBD dalam penanganan bencana bencana banjir secara menyeluruh baik didalam instansi BPBD itu sendiri maupun dengan instansi terkait yang ikut terlibat dalam penanggulangan bencana banjir dikota Bengkulu. Dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan teori Koordinasi menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan dalam buku *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah* (2006:10) yang mencakup empat dimensi sebagai alat ukur koordinasi, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Teori ini dipilih karena cocok dalam menjelaskan bagaimana koordinasi BPBD dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan banjir dikota Bengkulu. Lokus penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penelitian ini dilakukan pasca pandemic covid-19 sehingga adanya pembaharuan kondisi dan keadaan dalam kehidupan pemerintahan sehingga membuat penelitian ini menarik dan memiliki kebaharuan ilmu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan koordinasi penanggulangan bencana banjir, faktor penghambat dalam koordinasi serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dikota Bengkulu provinsi Bengkulu

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif Menurut Sugiyono (2017) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data dan fakta yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada dan relevan. Penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen utamanya teknik pengumpulan data yang dilengkapi dengan triangulasi dan analisis data yang bersifat induktif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar seperti transkrip interview, catatan di lapangan dan dokumentasi. Metode deskriptif menurut Silalahi (2012:27) merupakan suatu gambaran spesifik tentang situasi khusus, situasi sosial, atau hubungan sosial. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri fenomena atau masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif juga berfokus pada pertanyaan mendasar dengan memperoleh dan menyajikan fakta. Jadi metode deskriptif merupakan metode yang fokus penelitiannya kepada fenomena atau masalah berdasarkan perspektif kenyataan di lapangan. maka penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dalam pelaksanaan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan serta menafsirkannya dalam bentuk analisis yang memuat

fakta-fakta empiris dan menarik kesimpulan mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Kota Tomohon dalam mitigasi bencana tanah Longsor di Kota Tomohon dengan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dan tepat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendeskripsikan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam penanggulangan bencana banjir dikota Bengkulu provinsi Bengkulu menggunakan teori koordinasi dari Drs. H. Malayu S.P Hasibuan dalam buku *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah* (2006:10) yang mencakup empat dimensi sebagai alat ukur koordinasi, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin yang diuraikan sebagai berikut:

3.1 Kesatuan Tindakan

3.1.1 Penyusunan tugas dan fungsi yang tersusun secara logis dan sistematis

Dalam melakukan Penanggulangan Bencana banjir BPBD melakukan koordinasi dan kerjasama antara semua unsur-unsur pemerintah daerah baik pada tahap Pra, Tanggap darurat, Maupun Pasca Bencana. Contohnya pada pra bencana BPBD Berkoodirnasi dengan BMKG terkait keadaan cuaca beberapa hari kedepan, dan pada tahap tanggap darurat berkoordinasi dengan BASARNAS dalam hal peralatan dan bantuan personil, dan koordinasi dengan dinas social, dinas kesehatan dalam hal evakuasi dan pertolongan terhadap korban terdampak serta koordinasi dengan dinas PUPR terkait rekontruksi untuk bangunan yangmengalami kerusakan. Jadi bukan Cuma BPBD saja yang turun tangan tapi semua unsur pemerintah daerah bekerjasama pada bagian-bagian tertentu , tentunya BPBD sebagai Leading Sektor dalam penanggulangan bencana agar tindakan yang dilakukan efektif dan tepat sasaran. Koordinasi antara BPBD dengan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Koordinasi bisa lewat telepon atau lewat surat. Koordinasi berjalan dengan baik karena ada whatsapp grup, jadi setiap ada berita atau kejadian baru lebih mudah untuk diinformasikan kepada SKPD terkait.

3.1.2 pencapaian hasil

Tabel 4.4

Jumlah Kejadian Bencana Banjir Dikota Bengkulu

No	Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Banjir	Kecamatan	Kelurahan	Rumah terendam
1	2	3	4	5	6
1	2020	24 Kejadian	6 Kecamatan	18 Kelurahan	385 rumah
2	2024	20 Kejadian	5 Kecamatan	14 Kelurahan	1.648 rumah
3	2022	29 Kejadian	6 Kecamatan	20 Kelurahan	1.724 rumah
4	2023	14 kejadian	4 kecamatan	12 kelurahan	565 rumah

Sumber : BPBD Kota Bengkulu

Dengan mengedepankan koordinasi yang efektif hal ini dapat Meringankan pekerjaan tiap bagian dengan menciptakan keseimbangan antarbagian. Setiap bagian mendapatkan informasi yang jelas mengenai pencapaian dan tujuan dan

mengetahui perannya masing-masing sehingga dapat memberikan masukan dan saran terhadap anggota lain. Adapun hasil yang didapat dari koordinasi yang sudah berjalan baik adalah Bencana banjir pada 2023 dibuktikan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022, hal ini membuktikan bahwa hasil yang dicapai oleh BPBD kota Bengkulu sudah melakukan koordinasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya

3.2 Komunikasi

3.2.1 Informasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa komunikasi menjadi faktor pendukung jalannya koordinasi antara pegawai-pegawai dalam suatu organisasi maupun antar instansi. BPBD memiliki grup whatsapp yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan sebagai sarana komunikasi utama yang dimiliki oleh BPBD. Karena pada pelaksanaannya masyarakat mengetahui bahwa yang memiliki tanggung jawab jika terjadi bencana adalah BPBD, jadi BPBD yang menjadi jembatan penghubung atau pengkoordinir informasi bencana kepada dinas-dinas lainnya yang tergabung dalam tim reaksi cepat penanggulangan bencana Kota Bengkulu. BPBD Kota Bengkulu juga memiliki akun Instagram yang digunakan untuk menginformasikan perkembangan dan kejadian bencana di kota Bengkulu termasuk bencana banjir, BPBD kota Bengkulu sendiri memiliki tim Humas yang mengelola berita atau kegiatan yang akan diupload di platform Instagram milik BPBD Kota Bengkulu yaitu @bpbdkotabengkulu,

3.2.2 Pertemuan

BPBD dan instansi terkait belum memiliki jadwal terkait rapat dan pertemuan membahas bencana terkhususnya bencana banjir BPBD Kota Bengkulu sejauh ini hanya berkomunikasi via Whatsapp Group. Namun apabila terjadi sesuatu bencana yang mengharuskan pertemuan dan membahas suatu hal yang *Urgent* maka pertemuan darurat akan dilaksanakan menyesuaikan situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk beberapa instrument penanggulangan bencana terlibat, karena tidak dipungkiri komunikasi tatap muka juga perlu dilakukan disituasi tertentu untuk pengambilan keputusan yang mendesak. Namun BPBD kota Bengkulu ikut serta aktif dalam mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang rutin diadakan oleh BNPB setiap tahunnya salah satunya 23 April silam BPBD kota Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi (RAKORNAS) di Hotel Bandung yang diikuti oleh perwakilan BPBD tiap Provinsi Bersama BNPB. Rapat tersebut membahas tentang Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana. Rapat ini membuktikan bahwa pertemuan-pertemuan perlu dilakukan agar memotivasi seluruh instrument BPBD tiap daerah untuk selalu berinovasi terkait penanggulangan bencana dengan pengembangan teknologi yang lebih maju. Selain itu BPBD melaksanakan kunjungan ke masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir untuk evaluasi, dan koordinasi langsung kepada masyarakat terkait pendapat dari sudut pandang masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Sosialisasi dan tinjau lapangan dilakukan oleh BNPB Kota Bengkulu diwaktu tertentu seperti pada senggang dan masa kesiapsiagaan bencana banjir berlandaskan Curah hujan yang ekstrem menurut BMKG.

3.3 Pembagian kerja

3.3.1 Perincian Tugas Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pembagian tugas dalam koordinasi antara BPBD, dengan dinas atau instansi terkait karena tugas yang dijalankan telah sesuai dengan tupoksi dan program kerja yang disusun dan ditetapkan di instansi masing-masing. BPBD hanya melakukan koordinasi terkait bencana yang terjadi di suatu wilayah sehingga masing-masing dinas dan badan menyiapkan kebutuhan sesuai dengan tugas dan fungsi serta program masing masing dinas atau badan tersebut. Perincian tugas Anggota BPBD Kota Bengkulu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti bidang Pencegahan memiliki tugas yang berfokus pada proses pencegahan dan mitigasi bencana, bidang kesiapsiagaan Berfokus pada proses kesiapan dan siaga disaat bencana terjadi baik pada saat sebelum bencana terjadi maupun pada saat bencana terjadi, salah satunya proses evakuasi korban, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bidang yang berfokus pada setelah bencana terjadi yang membantu proses pemulihan baik secara fisik, psikologis, maupun material. Terakhir yaitu bidang Logistik yang bertugas menyalurkan bantuan dana logistic kepada masyarakat terdampak bencana banjir hal ini berkoodinasi dengan dinas sosial bahkan masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan. Salah satu tugas yang dimiliki oleh instansi terkait penanggulangan bencana banjir adalah BMKG (Badan dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memiliki tugas menginformasikan kepada BPBD Kota Bengkulu tentang curah hujan yang akan terjadi dalam 5 hari atau dalam seminggu kedepan yang mana cuaca yang ekstrem dapat mempengaruhi terjadinya bencana banjir dikota Bengkulu.

3.3.2 Kemampuan/Skill

Instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir melatih skill Sesuai dengan SOP (standar Operasional Prosedur) yang sudah didelegasikan oleh lembaga yang menaungi. Seperti BPBD biasanya melakukan pelatihan yang diadakan oleh BNPB yaitu PUSDIKLAT (pusat Pendidikan dan pelatihan) terkait penanggulangan bencana. Skill yang harus dikuasai oleh Pegawai BPBD. Salah satu skill yang harus dikuasai seperti Pertolongan Korban di Ruang Terbatas (CSR), Pertolongan Korban di Perairan atau Water Rescue, serta Pertolongan di Bawah Permukaan Air atau Under Water Rescu., praktek teknik bongkar pasang peralatan, pengoprasian mesin senso, dan praktek pengoperasian perahu karet. Pegawai BPBD kota Bengkulu dikatakan sudah menguasai skill yang menjadi dasar dalam penanggulangan bencana, namun tidak semua pegawai BPBD menguasai skill tersebut. Hal itu dikatakan oleh Will Hopi bahwa "Pegawai disini sudah dibekali keterampilan dalam menaggulangi bencana banjir, Cuma ya itu. Tidak semua pegawai menguasai , namun kami berupaya memberikan pelatihan khusus pada pegawai kedepannya

3.4 Disiplin

3.4.1 Ketaatan aturan dan Norma

Menurut kepala Pelaksana BPBD kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir sudah ada SOP (standar Operasional Procedure) dalam proses peanggulangannya, SOP itulah yang menjadi pedoman dan harus ditaati pegawai dalam menanggulangi bencana banjir. Pegawai BPBD Kota Bengkulu sudah dinilai disiplin dalam menaati SOP tersebut menurut will Hopi selaku kepala pelaksana BPBD Kota Bengkulu namun Hingga saat ini belum ada Standar

Operasional Procedure (SOP) koordinasi antara BPBD dengan instansi lainnya terkait penanggulangan bencana banjir, koordinasi dilakukan biasanya dengan mengirimkan surat bahkan kadang terjadi secara spontan antara Kepala Pelaksana BPBD dengan instansi lainnya via telephone/whatsapp apabila itu kejadian mendesak yang memerlukan tindakan langsung. Namun apabila kejadian bencana tersebut sudah memerlukan tindakan yang lebih serius maka BPBD hendaknya mengajukan surat keperluan kepada Sekretaris daerah selaku EX Officio Kepala BPBD yang akan memberikan surat Disposisi kepada instansi dan instrumen lainnya yang diperlukan untuk terlibat dalam penanggulangan bencana. Pegawai-pegawai ini sudah bisa dikatakan telah disiplin selama ada bencana. Anggota langsung turun ke lapangan dan jika memang ada bencana yang terjadi. Tapi tidak dipungkiri masih ada beberapa yang lambat karena ada alasan tertentu tapi tetap diwajibkan untuk turun kelapangan.

3.4.2 Pengawasan

peran pimpinan organisasi mempunyai peran untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota organisasi. Di BPBD yang mengawasi jalannya organisasi sesuai dengan rencana tentunya pemimpin BPBD itu sendiri yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu. Dalam kejadian bencana dilapangan pimpinan juga sudah sepatutnya menjadi contoh bagi para bawahannya tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Pimpinan memiliki hak dan kewajiban untuk menegur bawahan yang melakukan pekerjaan secara kurang maksimal. Karena pada pelaksanaannya apabila terdapat pimpinan di lokasi kejadian maka pegawai akan segan apabila tidak optimal melakukan pekerjaannya. Hal ini menjadi tugas bagi para pimpinan untuk dapat menanamkan sikap yang dimiliki oleh bawahan bahwa bekerja untuk tidak harus diawasi terlebih dahulu lalu melakukan pekerjaannya dengan baik, namun melakukan pekerjaan harus secara optimal karena hal ini dilakukan untuk membantu secara kemanusiaan masyarakat yang terkena bencana yang terjadi secara tiba-tiba.

Dalam lingkup antar organisasi ada yang namanya APIP yaitu adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal. Pengawasan pelaksanaan jalannya organisasi BPBD juga diawasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam hal evaluasi anggaran pengeluaran keperluan organisasi.

3.5 Hambatan Dalam koordinasi penanggulangan Bencana banjir dikota Bengkulu

3.5.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan pasti ditemukannya hambatan. Salah satunya yaitu BPBD sendiri masih kekurangan SDM Pegawai Negeri di Kantor BPBD Kota Bengkulu yang cukup cakap dalam bidang kebencanaan, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Bengkulu seperti kurangnya perahu viber, dan masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya, sehingga terkadang mindset masyarakat berubah dari mengatasi bencana banjir

menjadi terbiasa hidup berdampingan dengan banjir, yang mana bagi beberapa masyarakat, banjir sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Tim Satgas BPBD masih tergolong kurang personil. Ini diakibatkan karena anggaran kantor yang masih belum memadai untuk menambah jumlah personel tim satuan tugas bencana. Kekurangan pegawai ini pasti menimbulkan hambatan-hambatan bagi BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu. BPBD Kota Bengkulu masih kekurangan anggota tim satgas yang memiliki peran penting dalam melaksanakan penanganan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu. Tim satgas ini diisi oleh pegawai honorer yang memiliki jam piket 24 jam untuk mengatasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Kota Bengkulu. Kendala anggaran kantor yang kecil menyebabkan pihak BPBD terus berusaha untuk mendorong naiknya anggaran sehingga dapat menambah jumlah satgas BPBD.

3.5.2 Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa BPBD masih kekurangan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana. Sebagai contoh bila terjadi bencana Banjir, BPBD Kota Bengkulu harus meminjam peralatan alat berat kepada BASARNAS karena BPBD Kota Bengkulu kekurangan peralatan seperti perahu viber dan pelampung yang menunjang proses evakuasi Bencana Banjir. Peralatan penanggulangan bencana pada BPBD Kota Bengkulu masih dianggap sangat kurang dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Untuk itu BPBD Kota Bengkulu sedang mengupayakan untuk pengadaan alat berat tersebut sehingga pelaksanaan tugas-tugas BPBD dapat berjalan lebih optimal. Hal ini juga dilandaskan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kota Bengkulu.

3.5.3 Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat penanggulangan bencana Banjir di Kota Bengkulu. Masyarakat yang terkadang susah diarahkan oleh BPBD Kota Bengkulu juga menjadi hambatan bagi BPBD Kota Bengkulu dalam percepatan penanganan bencana Banjir. Karena bagi BPBD Kota Bengkulu dalam suatu penanggulangan bencana itu perlu adanya keharmonisan antara tiga elemen yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Melalui wawancara di atas diketahui bahwa pihak BPBD juga terkadang merasa marah dan kecewa atas sikap masyarakat. Mereka mengatakan memang tupoksi BPBD untuk melakukan penanggulangan bencana, tetapi alangkah baiknya kalau masyarakat juga ikut berperan serta melakukan gotong royong agar kegiatan penanggulangan bencana Banjir semakin cepat selesai. Dalam suatu penanggulangan bencana itu perlu adanya keharmonisan antara tiga elemen yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sehingga terjadi percepatan penanganan bencana Banjir di Kota Bengkulu.

3.6 Upaya BPBD dalam Mengatasi Hambatan

1. melakukan kegiatan yang dapat mendorong koordinasi itu sendiri seperti rapat koordinasi secara rutin, pengambilan keputusan yang transparan, kegiatan evaluasi bersama, dan adanya prinsip desentralisasi serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi agar tanggung jawab yang diberikan terlaksana secara optimal.
2. Berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya mengenai kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, sehingga kekurangan bisa diatasi dengan meminjam sumber daya dari

instansi yang berbeda seperti damkar, basarnas dan TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

3. Melakukan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat guna membangun kesadaran peduli lingkungan ditngah masyarakat

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana hasil penelitian oleh Septi Dwi Wulandari(2022) membahas tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan didapati hasil bahwa pada indikator Komunikasi, Pembagian tugas masih ditemukannya kendala yang salah satunya dinas PUPR belum melakukan tanggung jawab tugasnya dalam melakukan perbaikan drainase yang mempengaruhi terjadinya banjir dan belum memiliki jadwal rapat pertemuan rutin membahas masalah penanggulangan banjir, selanjutnya Kansrida Br Tarigan (2015) dalam hasil penelitiannya BPBD Karo belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal. disebabkan oleh fakta bahwa BPBD Kabupaten Karo masih baru terbentuk, dengan jumlah pegawai dan fasilitas kantor yang belum memadai. Selain itu, hubungan antara BPBD Kabupaten Karo dan dinas-dinas lainnya juga belum mencapai tingkat harmoni yang diinginkan, karena masih terdapat ego sektoral di antara instansi-instansi tersebut dalam konteks penanggulangan bencana penelitian Edho Yayang Pratama (2023) menyimpulkan bahwa koordinasi BPBD dan PUPR belum berjalan Optimal, penelitian ini dilakukan dilokasi yang sama dan membahas pokok permasalahan yang sama yaitu banjir, namun pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis ini disimpulkan bahwa koordinasi BPBD sudah berjalan sudah cukup baik dibandingkan dengan 2024.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa BPBD Kota Bengkulu telah melakukan koordinasi dengan cukup baik sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan indikator kesatuan Tindakan, komunikasi, pembagian kerja, yang sudah terlaksana dengan baik, meskipun pada dimensi kesatuan tindakan BPBD masih belum berjalan beriringan dengan masyarakat yang masih meremehkan dampak dsri bencana banjir yang mana hal tersebut menghambat BPBD dan dinas terkait melakukan evakuasi banjir. Di samping itu, terdapat 4 tujuan utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu meningkatkan pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam perspektif pelayanan kepada masyarakat berkelanjutan, meningkatkan fungsi Badan dalam teknis pelaksanaan penanggulangan bencana, meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya penanggulangan bencana dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana. Selain itu, ada 5 sasaran yang hendak dicapai oleh BPBD, yaitu meningkatnya pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meningkatnya kualitas penanggulangan bencana, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. koordinasi merupakan proses yang penting dalam sebuah organisasi yang mana koordinasi diartikan sebagai proses pengintegrasian, menyatukan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Koordinasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan organisasi, termasuk penanggulanagan bencana banjir yang merupakan bencana yang

tidak bisa diatasi oleh 1/2 pihak melainkan diatasi Bersama-sama oleh berbagai banyak pihak yang dapat terlibat dalam penanggulangan bencana banjir. Koordinasi yang efektif dalam penanggulangan bencana banjir berpengaruh dalam penanganan bencana banjir yang optimal

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana Banjir sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan menurunnya kejadian Bencana banjir pada tahun 2023 di Kota Bengkulu. indikator koordinasi kesatuan Tindakan sudah memiliki penyusunan tugas dan fungsi serta pencapaian hasil yang lebih baik dibanding sebelumnya, indikator komunikasi dengan bertukar informasi via whatsapp group dan menggunakan Instagram dalam memberikan informasi, pembagian kerja yang terlaksana sesuai dengan TUPOKSI masing-masing instansi yang tidak saling mencampuri namun saling bekerja sama dan sikap disiplin yang disertai dengan kesadaran pegawai yang sudah cukup baik serta pengawasan oleh APIP didalam organisasi untuk mengawasi Tujuan organisasi BPBD berjalan sesuai dengan rencana. Faktor yang menjadi penghambat strategi BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kota Tomohon yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran dan kerjasama masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor dan keterbatasan sumber daya manusia. Faktor yang menjadi pendukung strategi BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kota Tomoho yaitu adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang mitigasi bencana, bantuan langsung pemerintah Pusat dan Daerah dan semangat dan partisipasi aktif masyarakat

Faktor penghambat yang ditemukan peneliti pada saat pelaksanaan penelitian di BPBD Kota Bengkulu ialah masih kurangnya sumber daya manusia yang menguasai beberapa skill dalam penanggulangan bencana banjir dalam tim satuan tugas penanganan penanggulangan bencana, minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang penanganan bencana Banjir di Kota Bengkulu, serta partisipasi masyarakat yang tergolong masih kurang untuk membantu petugas melakukan penanganan penanggulangan bencana dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga lingkungan

Upaya BPBD Kota Bengkulu ialah melakukan kegiatan yang dapat mendorong koordinasi itu sendiri seperti rapat koordinasi secara rutin, pengambilan keputusan yang transparan, kegiatan evaluasi bersama, dan adanya prinsip desentralisasi serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi agar tanggung jawab yang diberikan terlaksana secara optimal. Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi diperlukan adanya peningkatan pemahaman, pembinaan, serta sosialisasi bagi stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana, dan melakukan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan

penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada BPBD Kota Bengkulu beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian ini orang tua dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Handoko, T. Hari. 2003. Manajemen. Cetakan Kedelapan Belas. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Bumi Aksara

_____, 2006. Manajemen Dasar, Pengertian,

Inu Kencana Syafie ,/ *Ilmu pemerintahan* (Bandung : Mandar Maju , 2003) hlm 135 Masalah Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Moekijat. 1994. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: Mandar Maju.

Muhadam Labolo ,/ memahami *Ilmu pemerintahan* (Jakarta : Rajawali Pers , 2011) hlm 135

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha Taliziduhu, / *Teori Budaya Organisasi*, (Jakarta : Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta) hal 57

_____, 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi* Cetakan Kedua. Jakarta: Intermedia.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Edho Yayang Pratama 2022 'Koordinasi BPBD Dan Dinas PUPR Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu', Repository IPDN (2022), doi: http://eprints.ipdn.ac.id/Pratama=3AEdho_Yayang=3A=3A.html

Pusta' Ramdani, Endah Mustika, 'Koordinasi Oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung', Jurnal Ilmu Administrasi, (88-101), doi: <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/50>

Kansrida Br Tarigan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi ,(75-97) Gunung Sinabung, Repository USU (2015) doi: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/56122>

Cindy Monica Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Penanggulangan Pascabencana Banjir Di Kota Medan, Jurnal UNIVED (2022) doi: <https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3237>

Vira Amalia Bakti, Fadlurrahman Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Di Kabupaten Purworejo, Jurnal Masalah-Masalah Sosial (2020), doi; <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1594>

Sitompul, Munawir Pamaun (2021) Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan, doi: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/46815>

Septi Dwi Wulandari, Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan (2020) Vol. 8 No. 3 (2022): August 2022,doi: <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3>